

MUHAMMADIYAH BIDIK TAMBANG BATUBARA

PP Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengelola tambang. Muhadjir Effendy yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal akan menjadi ketuanya. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan belum mengetahui di mana lokasi izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola. Meski begitu, Muhammadiyah berharap mendapat jenis tambang batubara. Muhammadiyah menyatakan tidak berorientasi pada profit atau keuntungan dalam pengelolaan itu. Tapi akan mengutamakan pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Bahkan, mereka juga sesumbar jika pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan) maka Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan dikembalikan. Janji ya!

Baca di hal 11....



● **PERTAMA**, Kekayaan alam adalah anugerah Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Pengelolaan pertambangan sejalan dengan tujuan Muhammadiyah untuk memajukan ekonomi dan menjaga sumber daya alam. Fatwa Majelis Tarjih (9 Juli 2024) menyatakan bahwa pertambangan pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada larangan yang jelas.

● **KEEMPAT**, Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah melibatkan profesional dari kader dan warga Persyarikatan, masyarakat sekitar, perguruan tinggi, serta menerapkan teknologi untuk meminimalkan kerusakan alam.

POLITIC (Hal.3)
**DPR Desak Aparat
Segera Selidiki Skandal
Impor Beras
Rp 294 Miliar**

● **KETIGA**, Muktamar ke-47 Muhammadiyah (2015) mengamatkan penguatan dakwah ekonomi. Pada 2017, Muhammadiyah menerbitkan Pedoman BUMM untuk memperluas dakwah di sektor industri, pariwisata, dan jasa.

● **KEDUA**, Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, berkat jasa-jasanya, untuk mengelola tambang guna kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

**9 POIN
PERTIMBANGAN
MUHAMMADIYAH
TERIMA TAMBANG**

Lanjutan Ke hal...11



Soal Inisial T Pengendali Judi Online Bareskrim Periksa Kepala BP2MI, Kapolri: Percepat Penangkapan

JAKARTA-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, pemanggilan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani pada Senin (29/7/2024) untuk mempercepat penangkapan orang yang disebut inisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia.

"Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan, Bapak Benny Ramdhani kami minta untuk hadir," ujar Listyo dikutip Minggu (28/7/2024).

Benny menyampaikan inisial T tersebut dalam sambutannya di pembukaan pengukuhan komunitas pekerja migran di Medan, Selasa (16/7/2024).

Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan. Merespon hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudo Wisnu Andika mengatakan, Bareskrim telah mengeluarkan surat penyelidikan perihal kasus tersebut. Pemanggilan Benny dilakukan untuk dimintai keterangan.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani, sebagai saksi pada Senin, 29 Juli 2024. Pemanggilan ini terkait dengan pernyataan Benny Ramdhani mengenai sosok inisial T yang diduga sebagai pengendali judi online di Indonesia.

"Kepala BP2MI kami panggil untuk sebagai saksi besok hari Senin," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Raharjo Puro dalam keterangannya.

Yang mengganjal menurut Benny, ia tidak tahu mengapa Bareskrim baru memanggilnya. Ia menyebut informasi yang telah ia sampaikan di forum tersebut telah disampaikan dalam rapat terbatas dengan presiden 2023 lalu. Yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menkopolkam yang kala itu masih dijabat oleh Mahfud MD.

"Saya sudah sampaikan itu sejak 2023, nggak tahu kenapa baru dipanggil sekarang," ujar Benny saat dihubungi Tempo.

Berdasarkan data migrant care kasus WNI yang jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan operator judi online serta online scam di luar negeri paling banyak terjadi di Kamboja.

Laporan aduan yang masuk ke Migrant care pada 2022, total



Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani

masyarakat yang mengaku menjadi korban judi online dan online scam di Kamboja sebanyak 202. Setelah Kamboja Negara yang kerap menjadi tujuan TPPO WNI untuk dijadikan scammer dan terlintas judi online adalah Myanmar.

Benny Siap Hadir

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani mengklarifikasi pernyataannya terkait sosok T yang disebut menjadi pengendali judi online di Indonesia. Menurut Benny, ada kesalahpahaman dalam pemberitaan terkait pernyataannya.

Dalam pernyataannya di acara Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KAWAN PMI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (26/7/2024), Benny Ramdhani menyebut tidak hanya fokus pada judi online yang ada di Kamboja saja, tapi juga meliputi kasus scamming online atau penipuan online.

"Di mana penempatan ilegal ke Kamboja itu kan kerja di judi online dan scamming online. Nah, itu yang dalam beberapa pemberitaan jadi hilang. Kok semua jadi fokus ke judi online," kata Benny Ramdhani saat dihubungi, Sabtu (27/7/2024).

"Padahal yang saya sampaikan kaitan dengan penempatan ilegal itu adalah judi online di Kamboja," sambung dia.

Menurutnya, pencegahan baik dalam kasus judi online ataupun kasus scamming ilegal ke Kamboja. Meski begitu, Benny masih tetap membenarkan pernyataannya perihal sosok inisial T yang diduga pengendali judi online di Tanah Air.

"Waktu itu saya lontarkan mudah kok ya untuk mencegah penempatan ilegal ke Kamboja. Ya tangkap saja, proses hukum, kepada inisial T, gitu kan. Yang diduga inisial T pengendali bisnis judi online," kata Benny.

Benny menyatakan tidak punya kapasitasnya untuk mengungkap kasus judi online dan keterkaitan sosok inisial T tersebut, melainkan mengamankan warga Indonesia yang menjadi sasaran scamming hingga ditempatkan di Kamboja.

Ia telah menerima surat pemanggilan dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan untuk menjelaskan terkait sosok inisial T yang diduga sebagai pengendali judi online di dalam negeri.

"Insyallah (Senin) pagi ya, kalau enggak siang pagi. Perkiraan pagi jam 10 sampai jam 12," kata Benny.

"Saya pastikan saya siap datang. Siap lahir batin," ucap Benny.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana buka suara terkait sosok berinisial T yang disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Ivan mengatakan, jika berbicara inisial, semua huruf pun ada.

"PPATK bagian dari satgas sudah menyampaikan semua. Kalau inisial, apa pun inisialnya, dari 2 juta nama juga, sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada, udah pasti ada. Dari ribuan nama, sebut saja 28 abjad, sudah pasti ada," kata Ivan di gedung KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Ivan menegaskan PPATK tidak takut mengungkap sosok T tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak dalam kapasitas melakukan penindakan.

"Ini bukan tentang takut tidak takut, ya, ini PPATK sekarang melakukan kajian terkait pembuka

data, 2.000 diantaranya kita duga sebagai pengepul, di ujung sana," jelasnya.

"Inisial-inisial banyak sekali, luar biasa banyak. Posisi PPATK tidak dalam kapasitas melakukan upaya katakanlah penindakan, kita serahkan kepada teman-teman penyidik melalui analisis yang kita sampaikan," sambung dia.

Ivan juga menanggapi sosok inisial T itu disebut kebal hukum. Menurutnya, pihaknya tidak dalam konteks mengatakan sosok tersebut kebal hukum atau tidak.

Ivan menilai ini merupakan konteks pelanggaran pidana. Dia lantas menyerahkan kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani terkait sosok T apakah pernah terkena pidana atau tidak.

"Jadi kita tidak bisa mengatakan orang kebal hukum atau tidak dalam konteks ini. Jadi tanyakan saja ke Pak Benny, apakah yang bersangkutan sudah pernah kena pidana atau seperti apa, kami nggak tahu," ungkap dia.

"Dalam konteks PPATK, tugas Satgas adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyidik, rapat terakhir sudah clear ditangani benar-benar sama Bareskrim. Sama sekali nggak ada ketakutan, ke arah mana," lanjutnya. (wid,rls,ist/dya)

NILAI TRANSAKSI JUDI ONLINE DI INDONESIA



DPR Desak Aparat Segera Selidiki Skandal Impor Beras Rp 294 Miliar

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mendorong penegak hukum bergerak cepat untuk menyelidiki kasus demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar.

"Sebagai wakil rakyat harus tergerak untuk mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terkait demurrage impor beras yang sangat mahal tersebut," kata Bambang, Minggu, (28/7/2024).

Bambang mendorong aparat penegak hukum segera menyelidiki demurrage beras Bulog senilai Rp 294,5 miliar lantaran mencium adanya proses yang salah. Bambang menekankan, terdapat proses yang tidak efisien sehingga menyebabkan terjadinya demurrage Rp 294,5 miliar.

"Impor sudah sering dilakukan kenapa beda tentu ada yang salah sehingga tidak efisien," ungkap Bambang.

Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir. Bambang mensinyalir kenaikan harga beras tersebut berkaitan dengan demurrage senilai Rp 294,5 miliar.

"Tentu ada hal yang tidak tepat yang mengakibatkan pemborosan. Kemudian nantinya mau dijual berapa (beras), lebih baik genjot produksi beras petani," tandas Bambang.

Terpisah, pengamat Achmad Ismail mengingatkan, pentingnya untuk menutup celah potensi kecurangan atau korupsi dalam impor beras agar negara tidak dirugikan.

Menurut dia, evaluasi dalam pengadaan impor beras harus dilakukan agar pelaksanaan impor sesuai tata kelola dan bebas dari kepentingan pihak eksternal maupun internal.

"Dampak kerugian dari fraud lewat alur itu harus segera ditindak lanjuti melalui perbaikan sistem tata kelola dan penegakan hukumnya," kata Achmad.

Ia mengatakan, saat ini masih ada celah administrasi dalam pelaksanaan impor tersebut sehingga terjadi kasus biaya denda tambahan akibat peti kemas tertahan di pelabuhan (demurrage).

Oleh karena itu, praktisi BUMN ini mengharapkan adanya pembenahan terutama dalam transparansi, akuntabilitas serta perbaikan integritas perusahaan agar upaya penyelewengan hukum tidak terjadi lagi.

"Kasus demurrage beras itu mengindikasikan adanya fraud atau kecurangan lewat alur administratif berikut kewenangan yang menyertainya," ujar Achmad.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum



(Ilustrasi) Di tengah isu skandal demurrage atau denda impor beras, Perum Bulog-Badan Pangan Nasional (Bapanas) dituntut untuk segera stabilkan harga beras di pasaran. (ist)

Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024) lalu, atas dugaan pengelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di pelabuhan.

Dugaan kerugian demurrage muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda di sejumlah wilayah kepabeanaan tempat masuknya beras impor.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan mekanisme lelang impor sudah dilaksanakan secara terbuka dan ketat, yang diawali dengan pengumuman bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras dari luar negeri.

Para peminat lelang tersebut biasanya tercatat mencapai 80 sampai 100 importir. Namun, perusahaan yang mengikuti proses lelang lanjutan umumnya hanya mencapai 40 hingga 50 perusahaan, seiring dengan seleksi ketat yang telah diterapkan Perum Bulog.

Pilkada Tak Ada Tambahan Impor

Di sisi lain, Perum Bulog memastikan bahwa tidak ada pe-

nambahan penugasan beras impor jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh Indonesia.

Berkaca dari Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari 2024, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan bahwa penawaran dan permintaan pada periode tersebut cenderung tidak mengalami perubahan signifikan.

Dia mencontohkan, sebanyak 100 ton beras dibeli untuk kemudian dibagikan kepada rumah tangga yang menjadi sasaran. Dalam hal ini, penerima tidak akan membeli beras sehingga permintaan tidak mengalami banyak perubahan.

"Jadi dilihat dari supply demand enggak terlalu banyak berubah sebenarnya. [Kuota impor] Sama aja," kata Bayu saat ditemui di sela-sela NFA Fun Run 5K di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Selain itu, Bayu, mengutip pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa produksi beras dalam negeri mulai meningkat seiring adanya program pompanisasi. Hal ini, lanjutnya, akan ikut menambah pasokan ke pasar.

Dia juga memastikan bahwa stok beras dalam negeri tetap aman jelang pilkada serentak. Pasalnya, mulai Agustus, Oktober, dan Desember 2024, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah juga akan mengoptimalkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gerakan pangan murah, hingga beras komersial dengan menggandeng pemerintah daerah misalnya untuk aparat sipil negara (ASN).

"Jadi Bulog mempersiapkan dengan cara bahwa pasokan yang ada di masyarakat itu terjaga," ujarnya.

Pemerintah pada Maret 2024 menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari sebelumnya 2 juta ton pada 2024. Dengan demikian, total kuota impor beras untuk tahun ini mencapai 3,6 juta ton.

Adapun hingga Juli 2024, Bayu menyebut setidaknya sudah ada sekitar 2,2 juta ton beras yang masuk ke Indonesia. Beras impor yang masuk itu paling banyak berasal dari Thailand dan Vietnam.

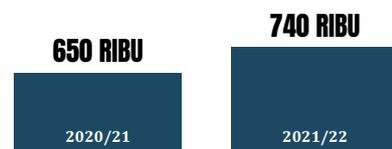
Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengungkapkan bahwa penugasan tambahan ini bertujuan agar Indonesia memiliki stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang cukup untuk mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.

"Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras]," kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Dia menegaskan, importasi yang dilakukan pemerintah sangat terukur sehingga harga gabah di tingkat petani dipastikan tetap terjaga. Pasalnya, kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah telah memperhitungkan jumlah produksi dan kebutuhan nasional. (wis,tro,ant,rla/dya)

VOLUME IMPOR BERAS TAHUNAN INDONESIA MENURUT USDA (2020-2024)

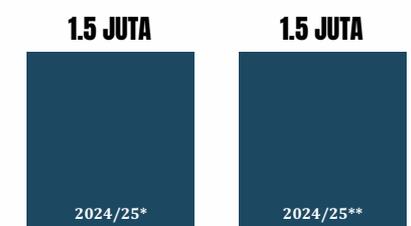
Metric Ton



KET

*: Mei 2024

** : Juni 2024



Janggal! Jaksa Bakal Ajukan Kasasi tapi Ronald Tannur Sudah Bebas dari Rutan

JAKARTA—Ronald Tannur anak dari anggota DPR RI PKB Edward Tannur telah menghirup udara bebas Rutan I Surabaya. Usai diputus bebas Rabu (24/7/2024), tak menunggu lama, tersangka kasus kematian Dini Sera Afrianti itu langsung keluar tahanan pada malam harinya.

DPadahal, Kasi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan menempuh kasasi. Tim JPU bakal melakukan proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi.

"Sambil nanti 14 hari ke depan, kami memberikan memori kasasi," ucap Putu Arya di Kejari Surabaya dikutip Minggu (28/7/2024).

Putu Arya menyampaikan, ada beberapa pertimbangan yang pertama terkait pertimbangan majelis hakim di PN Surabaya yang menyatakan tidak ada saksi. Hakim mengungkapkan bahwa tidak ada saksi satupun yang tahu penyebab kematian dari korban Dini. Lalu pertimbangan kedua, penyebab kematian yang disampaikan hakim. Yaitu, Dini tewas karena alkohol di lambung.

"Kami sebagai tim jaksa penuntut umum sudah optimal menyampaikan secara lugas di persidangan itu bahwa hasil alat bukti atau surat visum et repertum (VER) itu ada juga luka di hati. Diduga luka itu akibat dari benda tumpul. Juga ada di korban pada saat itu ada bukti lindungan dari ban mobil kendaraan. Nah itu merupakan suatu bukti bahwa di situ ada fakta yang harus dipertimbangkan juga majelis hakim," papar Putu Arya.

Di sisi lain, persyaratan administratif pembebasan Ronald Tannur diklaim dipenuhi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Surabaya.

"Benar bahwa GRT atau Ronald Tannur telah dikeluarkan dari Rutan Surabaya pada 24 Juli sekitar pukul 22.00 WIB," ujar Karutan I Surabaya Wahyu Hendrajati melalui keterangan pers, Sabtu (27/7/2024).

Menurut Hendrajati, syarat pengeluaran yang ditentukan telah ada kekuatan hukum tetap. Yaitu dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tanggal 24 Juli 2024.

"Dan ada pula Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berdasar Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor: Print-PDM.424/M.4.10/Eoh.2/07/2024 Tanggal 24 Juli 2024," urai Hendrajati.

Hendrajati menegaskan, pihak rutan hanya menindaklanjuti putusan hakim dan eksekusi jaksa sesuai prosedur. "Peran kami hanya sebatas memfasilitasi saja, untuk kewenangan eksekusi ada pada jaksa," papar dia.

Ronald Tannur mulai ditahan pada 5 Oktober 2023 di Rumah Tahanan



Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dibanjiri karangan bunga bernada sindiran setelah majelis hakim memvonis bebas Ronald Tannur dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. (Ist)

Polrestabes Surabaya. Dia dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya sejak 29 Januari 2024.

Dia berada di balik jeruji Rutan Surabaya sekitar enam bulan. Sebelum putusan Pengadilan Negeri Surabaya, membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum.

Siap Diperiksa KY

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengaku siap bila tiga hakimnya yang memberikan vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tannur (31), diperiksa Komisi Yudisial

(KY) atau Badan Pengawas di Mahkamah Agung.

Tiga hakim itu ialah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul. Mereka membebaskan dan menganggap Ronald tak terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan atau pembunuhan seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti (29).

Humas PN Surabaya Alex Madan mengatakan tiga hakim yang menangani perkara Ronald ini pasti siap bila diperiksa oleh KY. Namun hingga kini belum menerima panggilan secara resmi.

"Ya iya [siap diperiksa]. Kalau misalkan objeknya mana kami belum ngerti, ini kan baru wacana-wacana, siapa aja yang nanti dimintai keterangan atau yang diperiksa, sebagai insan dari Mahkamah Agung ya [siap] bersidang [etik], sudah biasa," kata Alex.

Mekanismenya, kata Alex, KY haruslah menerima laporan atau aduan dari masyarakat terlebih dahulu. Selain itu, KY juga memiliki hak inisiatif bila putusan hakim itu menimbulkan polemik di masyarakat.

"Komisi Yudisial memang memiliki kewenangan. Memang itu kewenangan mereka. Satu, kewenangan karena laporan, kedua karena mereka punya hak inisiatif," ujar Alex.

Prosesnya pun panjang. KY harus lebih dulu mengirimkan surat pengantar kepada Ketua PN setempat,

untuk memberitahukan akan ada pemeriksaan hakim-hakim tersebut.

"Nanti mereka (KY) memberikan surat pengantar kepada ketua kami bahwa akan melakukan pemeriksaan. Mereka akan memberitahukan. Lalu ketua kami akan menyampaikan kepada hakim-hakimnya," katanya.

Setelah itu KY baru bisa melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap hakim yang dilaporkan. Di akhir mereka akan rapat untuk menentukan apakah hakim tersebut bersalah secara etik atau tidak.

"Dibuat sistem pemanggilan. Dipanggil dulu, diklarifikasi dulu. Nanti diklarifikasi, diperiksa. Lalu mereka akan menyimpulkan apakah memenuhi unsur pelanggaran etik, itu juga biasa," ucapnya.

Alex tahu kasus Ronald Tannur ini memang sedang ramai jadi perhatian publik. Namun ia meminta masyarakat untuk mengerti mekanisme persidangan.

"Namanya bersidang mungkin menurut masyarakat ada yang tidak adil, itu lah prosesnya. Kita lihat prosesnya, tidak ujuk-ujuk," tuturnya.

Meski bebasnya Ronald Tannur itu sedang ramai jadi pembicaraan masyarakat karena dinilai tak adil, hakim-hakim di internal PN Surabaya sendiri menghindari pembahasan tersebut. Alex mengatakan, mereka terikat kode etik tak boleh mengomentari putusan sejawatnya.

"Ini kan kami terikat kode etik, hakim itu dilarang berkomentar terhadap putusan rekan sejawatnya. Apalagi polemik, kami membicarakan aja enggak boleh. Kalau pakar silakan," pungkasnya.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) bakal melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur (31) selaku terdakwa kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang.

Keputusan tersebut diambil KY lantaran putusan pengadilan tingkat pertama tersebut menimbulkan polemik dan mencederai rasa keadilan.

"Komisi Yudisial memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai mencederai keadilan. Namun, karena tidak ada laporan ke KY sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka KY menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut," ujar Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata melalui keterangan tertulis. (wid,pra,ist,ant/dya)

PARA HAKIM PN SURABAYA YANG MEMVONIS BEBAS RONALD TANNUR



Hakim Erintuah Damanik

- Pada 2019, ia menjabat sebagai Humas PN Medan, kemudian dipindahkan ke PN Surabaya pada 2020 sebagai Pembina Utama Madya untuk menangani perkara Kelas IA khusus. Berdasarkan LHKPN KPK per 16 Januari 2023, total harta kekayaannya tercatat sebesar Rp 8,055 miliar.

- **Kasus besar yang ditanganinya:**
 - Menjatuhkan vonis pidana mati terhadap terdakwa Zuraida, pembunuh hakim Jamaluddin di PN Medan pada 2019.
 - Menolak praperadilan yang diajukan empat tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjro di PN Medan.



Heru Hanindyo

- Sebelumnya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang resmi pindah ke PN Surabaya pada November 2023 lalu. Dia juga pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari 2018-2019.

- **Kasus besar yang ditanganinya:**
 - Menolak gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan My Indo Airlines (MYIA) kepada PT Garuda Indonesia pada Oktober 2021.
 - Mengabulkan gugatan Perdata KLHK terhadap PT Agri Bumi Sentosa pada Januari 2023.



Mangapul

- Pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada 2021, yang kini resmi bertugas sebagai hakim di PN Surabaya.

- **Kasus besar yang ditanganinya:**
 - Menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Kabag Ops Polres Malang Wahyu Setyo Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Achmadi. Hanya saja, di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) putusan itu dibatalkan dan keduanya dijatuhi hukuman penjara 2,5 tahun dan 2 tahun.

Mochamad Afifuddin Resmi Jadi Ketua KPU Definitif

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Mochamad Afifuddin sebagai Ketua KPU definitif pengganti Hasyim Asy'ari yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena kasus etik asusila.

Afifuddin diketahui sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU usai putusan yang dikeluarkan DKPP terkait Hasyim.

Pengumuman itu disampaikan oleh komisioner KPU August Mellaz usia membuka kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 Pasca Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor KPU, Minggu (28/7/2024).

"Karena mengingat kebutuhan-kebutuhan organisasi dan juga tugas tanggung jawab organisasi ke depan kami dapat menyepakati pada pleno yang kami lakukan beberapa saat sebelumnya untuk menetapkan Pak Mochammad Afifuddin sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara definitif," kata August.

Disampaikan August, penetapan Afifuddin sebagai Ketua KPU definitif itu diputuskan dalam rapat pleno yang dilakukan beberapa saat sebelumnya. Rapat pleno itu, kata dia, dihadiri oleh enam pimpinan KPU dan Sekjen KPU.

August menyebut dengan penetapan tersebut maka Afifuddin resmi menjabat sebagai ketua yang sah hingga akhir masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027.

"Dengan demikian posisi definitif dari ketua KPU pak Mochammad Afifuddin akan menjalankan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatan keanggotaan komisi pemilihan umum periode 2022-2027," ucap dia.

Sebelumnya, Hasyim Asy'ari resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU buntut pelanggaran kode etik terkait kasus asusila terhadap anggota PPLN Den Hag berinisial CAT.

Pemecatan resmi itu ditandai dengan keputusan presiden yang menyatakan Hasyim diberhentikan secara tidak hormat. Keppres dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.

"Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

MK Kabulkan 44 Sengketa Pileg 2024

Di sisi lain, KPU RI meminta maaf



Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin (tengah) memimpin rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (28/7/2024). (ist)

karena pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi nasional hasil pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024 pada Minggu (28/7/2024) siang, mundur dari jadwal yang ditentukan.

Rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU RI ini dijadwalkan dimulai pukul 11.00 WIB. Namun, rapat baru dibuka dan dimulai oleh jajaran komisioner KPU RI pada pukul 13.35 WIB.

"Tentu kami minta maaf ya sebelumnya kalau tadi ada beberapa penundaan, karena kebutuhan-kebutuhan organisasi yang jaga kami lakukan," ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di ruang rapat, Minggu (28/7/2024).

Sebelumnya, Komisioner KPU RI August Mellaz menjelaskan, para pimpinan terlebih dahulu menggelar rapat pleno internal sebelum memulai rekapitulasi nasional hasil Pileg 2024.

Adapun rapat pleno rekapitulasi nasional ini digelar setelah KPU RI pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan 44 sengketa Pileg 2024. Diketahui, MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024 dengan beragam putusan, mulai dari pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.

Jumlah ini membuat tingkat dikabulkannya sengketa pileg pada 2024 sekitar tiga kali lebih banyak (14,81 persen) daripada 2019. Dari jumlah 44 gugatan yang dikabulkan, enam di antaranya Mahkamah mengabulkan seluruh gugatan pemohon, lalu 38 lainnya dikabulkan sebagian.

Perkara-perkara di luar itu ditolak dan dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim, baik dalam sidang pembacaan putusan pokok permohonan pada 6-10 Juni 2024 maupun dalam putusan sela, Mei

2024.

Sidang pembacaan putusan digelar selama tiga hari, mulai 6, 7, dan 10 Juni 2024. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Sementara itu, total keseluruhan perkara yang diregister oleh MK sebanyak 297 perkara. Sebanyak 191 perkara telah dibacakan putusan dismissal pada 21-22 Mei 2024.

Perkara yang dikabulkan MK salah satunya ialah permohonan yang diajukan Irman Gusman terkait pencoretan namanya di daftar calon tetap (DPT). Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) DPD Sumatera Barat.

"Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

"Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang," sambunginya.

Sementara itu, perkara yang ditolak MK ialah terkait permohonan PPP di dapil Jawa Tengah III. Dalam putusannya, MK menilai dalil permohonan PPP tidak jelas dan kabur.

"Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI dapil Jawa Tengah III tidak dapat diterima," kata Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan putusan nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2024).

Selain itu, MK juga menolak gugatan PPP mengenai permohonan suara DPRD Rembang 2. "Menolak permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Rembang, dapil Rembang 2," ujar Suhartoyo.

TENTANG MOCHAMMAD AFIFUDDIN

- Lahir pada 1 Februari 1980 di Sidoarjo, Jawa Timur.
- Afif pernah menjadi Presiden Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2000-2001 dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
- Setamat dari UIN (2004), Afif mengabdikan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN membidangi isu Islam dan Demokrasi sambil melanjutkan studi ke Magister Manajemen Komunikasi Politik di UI (2005-2007)
- Afif aktif dalam kegiatan kepemiluan mulai dari menjadi relawan pemantau di TPS pada Pemilu 1999 sampai menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) periode 2013-2015.
- Afif pernah menjadi dosen tidak tetap di Jurusan Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015-2017.
- Pada tahun 2017 Afif terpilih sebagai anggota Bawaslu RI. Lalu terpilih menjadi anggota KPU RI periode 2022-2027.



Sedangkan yang dikabulkan sebagian adalah gugatan Demokrat terkait penggelembungan suara PDIP dalam pemilihan DPR RI Dapil Banten II. MK meminta KPU untuk melakukan penyandingan ulang suara antara C Hasil TPS dan D Hasil Kecamatan di 120 TPS dapil Banten II.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). (wid,tro,rls,ant/dya)

Duet 'SaLaf' Santer Terdengar di Pilbup Malang Sanusi: Itu Usulan Kader PKB



Sanusi (kiri) santer bakal berpasangan dengan Lathifah Shohib (kanan) yang diusulkan PKB. (Dok. DPR RI)

MALANG - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, duet bakal pasangan calon (bapaslon) Sanusi dan Lathifah Shohib arau SaLaf mulai santer terdengar. Bupati Malang, Sanusi, mengungkapkan sosok bakal pasangannya di Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang ini merupakan usulan dari kader Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB).

Potensi duet bapaslon ini semakin menguat, usai Sanusi menghadiri sebuah pertemuan yang diadakan oleh PKB beberapa waktu lalu. Sanusi menjelaskan, kehadirannya dalam acara tersebut murni untuk memenuhi undangan konsolidasi internal DPC PKB Kabupaten Malang.

"Saya diundang di acara konsolidasi internal DPC PKB Kabupaten Malang" ujar Sanusi pada Minggu (28/7/2024).

Sanusi menegaskan, usulan pasangan SaLaf sendiri muncul dari inisiatif para kader PKB. "Ya ini (pasangan SaLaf) kan keinginan dari teman-teman PKB," kata Sanusi.

Ia juga menambahkan, seusai dirinya mendapatkan surat tugas resmi dari DPP PDI Perjuangan (PDIP) sebagai bakal calon kepala daerah (bacakada) Kabupaten Malang. Salah satu tugas pentingnya yaitu melakukan komunikasi lintas partai politik untuk memperkuat dukungan di Pilkada 2024.

"Ya karena bagian dari itu (surat tugas) kan saya diberikan tugas untuk konsolidasi ke parpol-parpol," tutur Sanusi.

Lebih lanjut, Sanusi berencana melaporkan seluruh kemajuan yang telah dicapainya selama menjalankan amanat surat tugas tersebut kepada DPD PDIP, termasuk dukungan yang diberikan oleh PKB. "Iya, iya (segera melaporkan hasil menjalankan surat tugas ke DPD PDI Perjuangan Jatim),"

lanjutnya.

Di sisi lain, saat disinggung mengenai surat rekomendasi dari DPP PDIP, Sanusi menjelaskan dirinya masih menunggu restu tersebut. Namun, Sanusi mengaku optimistis bakal mendapatkan surat rekomendasi dari DPP PDIP. Dalam kesempatannya ini, Sanusi juga memastikan bahwa komunikasi dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang terus berjalan lancar.

"Ya, nanti ditunggu saja, yang pasti sebelum pendaftaran Cakada ke KPU (surat rekomendasi akan keluar). Kalau sama Pak Didik (Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang) sampai hari ini komunikasi kami ya terus berjalan. Kami selalu berkomunikasi." pungkasnya.

Terpisah, Latifah Shohib, yang juga telah mendapat tugas khusus dari PKB, menyatakan kesediaannya untuk maju di Pilkada Kabupaten Malang. Ia siap menjadi bakal calon bupati maupun wakil bupati. Selain itu, Latifah juga terbuka untuk dipasangkan dengan kader dari partai manapun. (Santi/Dya)

Tren Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Malang Per Juli 2024 Dilaporkan 56 Kasus, Usia Korban Terbanyak 13-15 Tahun

MALANG - Hingga Juli 2024, sebanyak 56 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan telah terjadi di Kota Malang. Dengan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi yakni pelecehan dan pencabulan terhadap anak-anak dan perempuan, dalam rentang usia 13 hingga 15 tahun.

"Jumlah kasus yang dilaporkan hingga Juli 2024 mencapai 56 kasus. Tahun kemarin, sepanjang 2023 ada 92 kasus. Ini merupakan kasus kekerasan yang dialami anak-anak dan perempuan," ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Fulan Diana Kusumawati, Minggu (28/7/2024).

Diana berharap, jumlah kasus kekerasan ini tidak akan bertambah hingga akhir 2024 mendatang. Namun, pihaknya juga menyadari bahwa prediksi terkait kasus kekerasan sulit dilakukan. "Yang lagi tren sekarang adalah pelecehan, pencabulan. Kalau dari laporan, korban rata-rata usianya antara 13 sampai 15 tahun," ungkapnya.

Di samping itu, Diana juga menyebutkan di semester dua 2024

ini, pelaporan kasus bullying relatif lebih sedikit. Dengan hanya dua kasus bullying yang terlapor hingga Juli 2024. Menurutnya, penurunan kasus bullying kemungkinan mencerminkan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat. Mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan semacam ini.

"Kalau untuk bullying alhamdulillah tidak terlalu banyak, per Juli ini ada dua kasus bullying yang terlapor ke kami. Kami juga tidak berharap ada tambahan lagi," tambahnya.

Lebih lanjut, untuk menanggapi dan menangani kasus kekerasan, UPT PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga telah menyediakan berbagai bentuk pendampingan. Yang disesuaikan dengan kondisi dan permintaan korban.

"Tergantung kasusnya, jika mereka butuh pendampingan psikolog kami siapkan. Jika butuh fasilitas visum, kami siapkan. Termasuk pendampingan ke kepolisian juga kami sediakan," jelas Diana.

Dalam proses pelaporan, Diana menjelaskan korban seringkali datang sendiri atau melaporkan kasus yang



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat saat menjenguk kondisi anak laki-laki asal Kedungkandang yang menjadi korban kekerasan orangtua di RSSA Malang. (Dok. Prokompim Kota Malang)

dialami melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) di masing-masing kelurahan. Sistem pelaporan ini, sambungnya, memastikan bahwa setiap kasus dapat ditindaklanjuti dengan segera dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, memberikan perspektif mengenai peningkatan laporan kasus kekerasan.

Menurut Donny, meningkatnya laporan bukanlah indikasi bahwa situasi semakin buruk, melainkan refleksi dari tingginya kesadaran masyarakat dan anak-anak untuk melaporkan kekerasan. (Santi/Dya)



DARI THE ADAMS UNTUK PALESTINA

SUMBER FOTO : RILANDA VIRASMA MEIPRITA UNTUK KOMPAS

THE Adams menjadi salah satu penampil di We The Fest 2024. Band yang kini diawaki oleh Saleh Husein (gitar dan vokal), Ario Hendarwan (gitar dan vokal), dan Gigih Suryoprayogo (drum dan vokal) ini tampil di hari terakhir perhelatan We The Fest 2024.

Dibuka dengan "Pelantar", The Adams tampil energik di panggung We The Fest, Minggu (21/7/2024) petang. Dedengkot skena musik independen Jakarta tahun 2000-an itu membawakan tujuh lagu yang semuanya bertengger di jajaran 10 daftar karya beken mereka di Spotify.

Kala situasi mulai memanas, nomor "Timur" membuat penonton semakin bergelora. Mereka berjingkrak dan bersorak, terlebih saat menyaksikan kibaran bendera Palestina tampak memenuhi layar LED panggung. Lirik "Timur" yang sarat harapan itu seakan sengaja dilantunkan bak doa bagi warga Palestina.

"Dan di hariku yang paling gelap//Semoga aku akan mengingat//Bahwa ini sementara//Dan akan segera pergi dengan cepat."

Setelah itu, penonton seiya sekata bersama-sama turut melagu di "Masa-masa". Dengan tempo cepat dan vokal harmonis yang dihasilkan Saleh dan Ario, lagu ini membuat penonton melompat kegirangan.

Puncak antusiasme itu kemudian dituangkan pada lagu "Konservatif". Di akhir penampilan mereka, Ario

sempat menodong mic ke arah penonton.

Namun, karena suara yang muncul tak sesuai harapan, ia lalu menyeletuk, "Anak muda segini banyak lemes amat suaranya, gimana mau ngelawan Tapera?"

Panggung musik rupanya tak hanya menjadi saluran ekspresi musik para musisi, tetapi juga menjadi saluran untuk menunjukkan dukungan dan kepedulian mereka kepada kemanusiaan. Kali ini, seruan kemanusiaan atas genosida yang terjadi di Palestina.

Perjalanan

The Adams, pelantun lagu 'Timur' merupakan band dengan genre rock indie yang terbentuk pada tahun 2002 silam. Berawal dari pertemanan para personilnya Ario Hendarwan, Saleh Husein, Pandu Fathoni, dan Gigih Suryo Prayogo, di Institut Kesenian Jakarta.

Nama The Adams diambil dari Adam dan Hawa, karena semua personilnya adalah laki-laki. Band ini merilis album perdana di tahun 2005 'The Adams' dengan single 'Konservatif' dan 'Waiting'. Lagu 'Konservatif' sendiri menceritakan tentang hubungan percintaan yang menjadi soundtrack di film Janji Joni tahun 2005.

Di masa-masa itu, The Adams disebut sebagai 'raja pensi' karena penampilan mereka dari pensi ke pensi tak diragukan lagi. Seiring berjalannya waktu, personil pun silih

berganti. The Adams memutuskan untuk mencari pemain keyboard yang di isi oleh Retiara Haswidya Nasution atau Kaka. Ia merupakan satu-satunya personil perempuan The Adams.

The Adams pun mengeluarkan album kedua mereka bertajuk 'V2.05'. Di album kedua ini, The Adams merilis single 'Hanya Kau' yang hingga saat ini masih menjadi lagu favorit para pendengar setia mereka.

Album kedua mereka juga berhasil menempati urutan 112 dari 150 album Indonesia terbaik versi Rolling Stones Indonesia edisi 32 di tahun 2007. Setelah album kedua, nama The Adams pun jarang terdengar.

Hingga The Adams aktif kembali di tahun 2014 dan mengumpulkan para personil untuk kembali manggung

membawakan lagu-lagu ciptaan mereka. Namun, di tahun 2018 The Adams harus kehilangan sang keyboardis, Kaka yang tutup usia. Di tahun 2019, Citra atau Ciwi mengisi posisi keyboardis The Adams yang kini diganti oleh Ghina Salsabila.

14 tahun berlalu, The Adams hadir untuk merilis album ketiga mereka bertajuk 'Agterplaas'. Album ini banyak menceritakan tentang pengalaman yang mereka lewati. Cerita tersebut terangkum dalam lagu 'Masa Masa'. Di dalam album ini, lagu "Timur" juga menjadi populer dan mendapat sambutan baik dari pendengar setia mereka.

Kini, The Adams menjadi salah satu line up yang wajib hadir di festival maupun konser musik di Indonesia (Kompas/Kumparan)

THE ADAMS



MANFAAT BERAS MERAH UNTUK KESEHATAN

BERAS merah merupakan biji-bijian utuh yang hanya mengalami sekali proses pengelupasan kulit, sehingga kandungan nutrisinya tidak banyak terbuang. Inilah yang membuat beras merah memiliki lebih banyak nutrisi dan termasuk jenis beras yang lebih sehat daripada beras putih.

Manfaat beras merah banyak untuk kesehatan. Selain menjadi sumber utama karbohidrat, beras merah juga mengandung protein, serat, beta karoten, dan zat besi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan beras putih.

Inilah yang membuat beras merah memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain memberikan energi dan nutrisi, beras merah juga dapat membantu perekonomian petani karena harganya yang lebih tinggi daripada beras putih.

Salah satu keunggulan beras merah dibandingkan dengan beras putih terletak pada komposisi nutrisinya. Nutrisi penting seperti serat, asam lemak esensial, vitamin B kompleks, serta mineral terkandung pada bagian kulit ari beras merah. Antioksidan yang terdapat dalam beras merah juga berperan penting dalam menangkal radikal bebas dalam tubuh. Beberapa manfaat kesehatan yang bisa Anda dapatkan dari konsumsi beras merah antara lain:

1. Kaya akan serat

Beras merah mengandung lebih banyak serat dibandingkan dengan beras putih. Serat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan, mengurangi risiko sembelit, dan menjaga kadar gula darah stabil.

2. Kandungan gizi yang lebih tinggi

Beras merah kaya akan nutrisi penting seperti vitamin B1, B2, B3, dan B6, serta mineral seperti magnesium, selenium, dan zat besi. Kandungan gizi yang tinggi ini mendukung fungsi sistem saraf, metabolisme energi, dan pembentukan sel darah merah.

3. Indeks glikemik rendah

Beras merah memiliki indeks glikemik lebih rendah daripada beras putih. Ini berarti beras merah tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam setelah dikonsumsi, sehingga lebih cocok untuk orang dengan diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula darah stabil.

4. Menyediakan antioksidan

Beras merah mengandung senyawa antioksidan seperti vitamin E dan selenium. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker.

5. Menyehatkan jantung

Karena kandungan serat, nutrisi, dan antioksidannya, beras merah dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Serat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat (LDL) dalam darah, sedangkan antioksidan melindungi pembuluh darah dari kerusakan.

6. Membantu pengelolaan berat badan

Kandungan serat yang tinggi

dalam beras merah memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Hal ini dapat mendukung pengelolaan berat badan yang sehat.

7. Menurunkan risiko diabetes tipe 2

Konsumsi beras merah dikaitkan dengan pengurangan risiko diabetes tipe 2. Serat yang tinggi membantu mengendalikan penyerapan gula dalam tubuh, sehingga menjaga kadar gula darah tetap stabil.

8. Mencegah kanker

Beras merah mengandung senyawa fitokimia, serat, dan antioksidan yang dapat memberikan perlindungan terhadap risiko kanker. Serat dalam beras merah dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mengurangi risiko kanker usus besar.

9. Mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular

Kandungan serat, vitamin, dan mineral dalam beras merah dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Serat membantu mengendalikan kadar kolesterol dalam darah, sedangkan antioksidan melindungi pembuluh darah dari kerusakan yang dapat menyebabkan penyakit jantung.

10. Menurunkan stres pada ibu menyusui

Beras merah dapat menjadi bagian

dari pola makan sehat ibu menyusui, karena mengandung nutrisi yang penting. Nutrisi yang seimbang dapat membantu menjaga keseimbangan hormonal dan mendukung kesehatan mental dan emosional, sehingga dapat membantu mengurangi stres pada ibu menyusui.

Dengan segala manfaat kesehatan yang dimilikinya, beras merah memang merupakan pilihan yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup. Konsumsilah beras merah secara teratur dan perhatikan perbedaan positif yang akan dirasakan. (nei,ist/dya)

FACEBOOK EKSIKSI DI TENGAH TREN KONTEN VIDEO PENDEK

VP OF FACEBOOK Tom Alison mengatakan pihaknya tetap percaya diri bahwa platform Facebook sebagai jejaring sosial tetap eksis dan digunakan oleh banyak pengguna dari beragam generasi di tengah tren konten video pendek yang sedang naik daun.

"Facebook melihat ini sebagai sebuah keuntungan, karena kami punya jaringan pengguna yang tidak hanya berisikan pengguna yang baru ingin menjadi kreator tapi juga memang menyukai konten-konten video. Terutama di APAC," kata Tom dalam wawancara bersama wartawan kawasan Asia Pasifik (APAC) yang berlangsung, Kamis (25/7).

Tom mengatakan pihaknya melihat tren video pendek sebagai konten merupakan lanskap yang kompetitif di industri jejaring sosial.

Hal itu dikarenakan video pendek memungkinkan banyak orang bisa mencoba peruntungan untuk menjadi kreator konten tanpa membutuhkan banyak modal karena untuk membuat konten tersebut hanya membutuhkan kamera ponsel yang canggih dan internet berkecepatan tinggi.

Apalagi saat ini industri ponsel pintar pun sudah banyak sekali mengembangkan kualitas kamera yang mumpuni sehingga potensi untuk menjadi konten kreator lewat video pendek terasa menjadi mudah.

Selain itu, konten video-video pendek dinilai memiliki daya tarik durasi yang singkat namun sudah dapat memberikan hiburan, edukasi,



dan informasi.

Menurut Tom, tidak jarang juga video pendek di Facebook membuat antar pengguna bisa membuka jejaring baru dan menggunakannya sebagai bahan untuk membuka obrolan baru.

"Hal ini (tren video pendek) juga membuat kami menerima perubahan konten ke bentuk video, termasuk video pendek di dalamnya," katanya.

Dalam peta jalan Facebook untuk tetap membuat platform ini relevan dari generasi ke generasi, pengembangan fitur-fitur video turut menjadi bagian dari strateginya.

Terutama untuk mereka kaum

dewasa muda yang saat ini berada di rentang generasi milenial dan generasi Z, Facebook terus memperkaya pengalaman-pengalaman baru untuk mengakomodir konten video.

Tidak hanya untuk video pendek, Facebook juga terus berinovasi pada fitur video termasuk untuk bentuk yang lebih panjang hingga video siaran langsung.

Dalam hal peningkatan akses konten video, Facebook mencatat terdapat peningkatan untuk kegiatan berbagi video secara pribadi di antara penggunaannya dengan pertumbuhan 80 persen dari 2023 ke 2024.

Bahkan apabila digabung dengan

capaian platform Meta lainnya, yakni Instagram, tercatat pada 2024 bahwa 60 persen aktivitas digital pengguna Facebook dan Meta dihabiskan untuk mengakses konten video. Reels menjadi pendorong utama pertumbuhan ini.

Terbaru di Facebook, untuk mengakomodir jenis konten video semakin nyaman untuk dinikmati pihaknya telah menghadirkan pemutar video layar penuh yang dilengkapi dengan fitur slider untuk melewati video berdurasi lebih panjang. Pemutar video dengan fitur slider itu kini sudah bisa digunakan oleh pengguna Facebook secara global. Tom (Antara)





WILSEN WILLIM HADIRKAN KOLEKSI BUSANA TERBARU DENGAN TENUN SUTRA LIAR

DESAINER Indonesia Wilsen Willim kembali bereksperimen dengan menghadirkan koleksi busana baru bertajuk "Lintas Waktu" dengan material utama tenun sutra liar karya maestro tenun sutra, Simon 'Lenan' Setijoko di festival mode tahunan JF3 2024.

Tenun sutra liar merupakan teknik tenun yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Bahan sutra yang digunakan berasal dari ulat sutra liar yang hidup di alam bebas. Proses pembuatan tenun sutra liar membutuhkan keterampilan dan ketekunan yang tinggi, sehingga hasil akhirnya memiliki tekstur yang unik dan eksklusif.

"Kami menggunakan sutra liar, bedanya adalah biasanya sutra berwarna putih, tapi ini (sutra liar) warnanya ada sedikit kuning, cokelat, krem," kata Wilsen saat ditemui dalam acara JF3 2024 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

"Jadi, kita nggak menggunakan

pewarna sama sekali di koleksi kali ini, ini pengalaman yang unik buat aku," sambungnya.

Mendiang Simon 'Lenan' Setijoko dikenal dengan kepiawaiannya dalam mengolah kain tenun sutra beserta tambahan aksesoris berupa sulaman, batik, atau lukisan pada karyanya. Oleh sebab itu, Wilsen tanpa ragu untuk menggunakan kain tenun sutra liar sebagai material utama untuk koleksi "Lintas Waktu".

Menariknya, seluruh tenun sutra liar karya Lenan yang Wilsen olah untuk koleksi "Lintas Waktu" merupakan koleksi pribadi dari kolektor sekaligus pemerhati wastra Chandra Satria.

Kali ini, Wilsen menggunakan material tenun sutra liar yang terbuat dari serat kepompong ulat sutra liar di hutan, sehingga memiliki keragaman warna yang terbentuk alami sesuai dengan daun yang dimakan ulat sutra itu semasa hidupnya.

Berbentuk gulungan panjang dengan lebar kecil, kain tenun sutra liar karya Lenan tersebut dirancang

oleh Wilsen menjadi delapan looks unik yang dapat digunakan dalam keseharian, baik acara formal maupun nonformal.

Koleksi tersebut terdiri dari luaran, celana, rok, selendang, atasan, mantel, dan gaun yang dikemas dengan rancangan unconventional bernuansa kontemporer.

Wilsen juga menambah aksen payet dan felting untuk memperkaya tampilan koleksi "Lintas Waktu". Selain menggunakan warna alami dari tenun sutra liar, Wilsen juga menggunakan warna hitam di koleksi busananya itu untuk memberikan kesan netral dan elegan.

Koleksi "Lintas Waktu" merupakan gabungan material tenun sutra liar dengan tenun sutra ternakan (sutra hasil budidaya), kain katun, wol, tulle, dan polyblend, dan material lainnya.

Melalui koleksi ini, Wilsen ingin mengajak para pencinta mode dan wastra untuk kembali menilik dan menghargai karya seorang maestro dari masa lalu dengan sentuhan gaya modern masa depan.

Melintasi lini waktu mempertemukan masa lalu dan masa depan, untuk menjaga warisan buah pikiran para pendahulu untuk keberlangsungannya di masa mendatang.

Dengan menghadirkan koleksi busana terbaru ini, Wilsen Willim tidak hanya menyuarakan keberagaman budaya Indonesia, namun juga memberikan apresiasi terhadap kerajinan tenun tradisional. Beliau juga turut mendukung program pemerintah dalam mempromosikan produk-produk lokal yang berkualitas dan berdaya saing di pasar global.

Kehadiran koleksi busana terbaru dari Wilsen Willim ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para desainer muda lainnya untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan busana yang memperkaya warisan budaya Indonesia. Semoga karya-karya mereka dapat terus dikenal dan dihargai baik di dalam maupun di luar negeri. (nei,ist/dya)



Muhammadiyah Bidik ... (dari Hal 1)

SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan belum mengetahui di mana lokasi izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola.

Meski begitu, dia berharap Muhammadiyah mendapat jenis tambang batubara. "Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (jenis tambang) batubara, jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang," seloroh Mu'ti di sela rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta pada Minggu, (28/7/2024).

Mu'ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia yang hadir, telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang di Indonesia. "Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial," kata dia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan izin tambang yang akhirnya diterima Muhammadiyah dapat dilihat secara pendekatan proporsional. Dia mengatakan agar segala hal terkait tambang jangan hanya disorot dari satu sisi.

"Agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan serba positif apalagi serba duit, kami jauh dari itu," kata Haedar.

Sebaliknya, kata Haedar, usaha tambang juga jangan selalu diletakkan sebagai sesuatu yang serba negatif. "Jangan meletakkan usaha tambang sebagai hal yang selalu pahit, penuh dengan ancaman, seperti akan kiamat," kata dia.

"Kalau Muhammadiyah masuk ke dunia tambang itu, kami akan tetap dalam posisi moderat, kami lihat sisi positifnya, cermati dan menjadikan sisi negatifnya untuk kami lakukan kajian sampai pada titik akhir nanti kita menemukan model (usaha penambangan) yang tepat."

Dalam kesempatan itu, Haedar menyatakan, IUP akan dikelola dengan asas pro kesejahteraan dan keadilan sosial serta lingkungan.

Ia memastikan bisnis ini akan disalurkan demi kepentingan masyarakat luas, bukan demi Muhammadiyah semata. "Dan kami tidak mengejar keuntungan, kalau mikir diri sendiri insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup," katanha.

Menambahkan, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memastikan pengelolaan tambang akan disertai dengan monitoring, evaluasi, hingga penilaian manfaat serta kerusakan bagi masyarakat.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada

pemerintah," kata Abdul Mu'ti.

Ia menjelaskan, saat pengelolaan nanti Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Muhammadiyah, sambung dia, akan melibatkan berbagai kalangan profesional saat mengelola tambang yang datang dari kader, warga sekitar area tambang, hingga perguruan tinggi. Muhammadiyah juga berkomitmen menggunakan penerapan teknologi yang meminimalisir dampak kerusakan alam.

"Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik," ujar dia.

Muhadjir Effendy mengaku dirinya baru mengetahui informasi tersebut hari ini dalam konsolidasi nasional Muhammadiyah di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

"Saya baru tahu tadi kalau ditunjuk, kok (ketua tim pengelolaan tambang)," ujarnya saat ditemui di Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta itu.

Dirinya belum mau berkomentar banyak atas penunjukkan tersebut. "Nanti saya kabari. Sudah cukup tadi sama Pak Haedar," imbuh dia.

Dirinya juga masih enggan untuk menyampaikan langkah awal dari tim pengelolaan tambang. "Belum lah, baru diumumkan tadi. Nanti tak kabari kalau sudah jalan," ucapnya.

Aktivistis; Disatukan Tambang

Forum aktivis Cik Di Tiro menuntut PP Muhammadiyah menolak tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah dalam aksi simbolik di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Sabtu (27/7/2024).

Massa aktivis membentangkan dua spanduk dan sejumlah poster guna mendesak PP Muhammadiyah menolak tawaran tambang.

Salah satu spanduk itu tertera tulisan 'Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang' yang merupakan sindiran kepada PP Muhammadiyah apabila menerima tawaran tambang seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU merupakan organisasi yang lebih dulu menerima izin pengelolaan tambang.

Sementara itu, doa qunut memang jadi salah satu perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam melaksanakan ibadah salat Subuh. Warga NU mengamalkan doa qunut, sedangkan Muhammadiyah tidak.

Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki, menjelaskan aksi simbolik ini mendesak agar PP Muhammadiyah menolak tawaran

pengelolaan tambang dari pemerintah.

"Kita mengingatkan Muhammadiyah untuk menjaga kewarasan, akal sehat, bahwa ormas itu tugasnya menjadi masyarakat sipil, organisasi yang mengontrol negara, pemerintah dan berpihak pada kepentingan warga negara," katanya usai aksi.

"Dalam kasus tambang ini, kami melihat penyakitnya, ancamannya, atau indikasinya ada tiga. Pertama, tambang itu merusak. Kedua, tambang itu merusak. Ketiga, tambang itu merusak," lanjutnya.

Masduki menuturkan urusan tambang ini nantinya akan merusak tata kelola ormas itu sendiri. Dia menilai pertimbangan selama ini telah merusak hak-hak sipil. Sudah banyak pula korban akibat bisnis ekstraksi ini.

"Ketiga, dia (tambang) merusak kekuatan alternatif dalam hal ini Muhammadiyah-NU sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi. Jadi, enggak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya," tegasnya.

Keputusan tersebut juga dikritisi Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 1995-1998 Mohammad Amien Rais. Dia mengaku sempat bangga ketika lembaga yang pernah ia pimpin menolak konsesi tambang bagi ormas keagamaan yang diberikan pemerintah.

"Yang semula tawaran memperoleh izin pengelolaan tambang batubara itu ibarat kail berbisa atau beracun dijauhi oleh Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mau ya, sangat sensitif itu, tahu akibatnya, jadi kita waktu (itu) bangga," kata Amien Rais melalui tayangan YouTube aku pribadinya, Sabtu (27/7/2024).

Dia menganggap perubahan sikap Muhammadiyah karena kepincut tentang urusan dunia. Karena itu, agar terhindar dari urusan duniawi, Amien Rais menyarankan sebaiknya Muhammadiyah menolak tawaran izin tambang tersebut.

"Namun karena kepincut dengan keduniaan akhirnya kail berbahaya itu ditelan oleh Muhammadiyah. Nah ini kail itu sudah ada dalam rongga mulut Muhammadiyah, tapi insyaAllah belum melewati kerongkongan. Kalau Muhammadiyah mau, kail beracun yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu masih bisa dimuntahkan kembali," katanya.

Amien Rais menganggap argumen Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas bahwa Muhammadiyah akan menjadi pemain tambang yang tidak merusak lingkungan adalah celotehan yang menghina akal sehat. Sebab dunia pertambangan diisi oleh mafia yang tak bermoral.

"Mengapa? Pertambangan di mana saja pasti merusak lingkungan sampai tahapan menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan Kembali. Apalagi dunia pertambangan itu dunia yang ganas, dan para pemainnya sebagian adalah bandit-bandit tanpa moral," katanya.

Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Lewat aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).(wid,rls,tro,nant,bbc/dya)

**9 POIN
PERTIMBANGAN
MUHAMMADIYAH
TERIMA TAMBANG**

Lanjutan dari hal...1

Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan, serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jemaah dan dakwah jemaah. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.A.P. (Ketua), Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. (Sekretaris), dengan anggota Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., Drs. H. Ahmad Dahlan Rais, M.Hum., Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., Dr. Arif Budimanta, Dr. M. Nurul Yamin, M.Si., dan M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si.

PBNU-PKB Memanas

Gus Yahya Utus 2 Petingginya Telusuri Polemik

JAKARTA- Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf menunjuk dua petinggi organisasi untuk mendalami hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan PBNU menyusul ketegangan antara dua organisasi dalam beberapa waktu terakhir. Gus Yahya sekaligus mengklarifikasi bahwa pihaknya tak akan membentuk panitia khusus soal pembenahan isu tersebut.

"Pansus itu kan usulannya Sekjen, dan keputusannya bukan membentuk pansus, bukan. Saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, bukan untuk pansus," katanya di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Keputusan itu termasuk menjadi poin rekomendasi hasil rapat Pleno PBNU yang digelar selama 27-28 Juli di Hotel Bidakara, Jakarta.

Tugas untuk mendalami hubungan NU dengan PKB itu dipercayakan kepada Wakil Rais Aam Kiai Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.

Keduanya ditunjuk karena pernah memiliki pengalaman sebagai pengurus struktural PKB saat awal-awal didirikan.

Kiai Anwar Iskandar adalah satu-satunya orang yang tersisa dari para pendiri awal PKB. Sementara Amin Said Husni merupakan Wasekjen pertama PKB.

"Dan dalam proses mereka akan terus berkomunikasi khususnya dengan Rais Aam, Kiai Miftachul Akhyar dan saya sendiri, sebagai ketua umum," katanya.

Gus Yahya juga menyebut warga NU yang jadi konstituen PKB tak sampai 20 persen. "Concern NU yang paling mendasar itu soal warga. Karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB nah, tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai yang lain, maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," kata Gus Yahya.

"PKB nggak bisa mengklaim NU hanya untuk PKB saja, itu tidak bisa, sering saya singgung di mana-mana, warga NU yang menjadi konstituen PKB tidak sampai 20 persen," tambahnya.

Gus Yahya mengatakan banyak kader NU yang berada di partai selain PKB. Dan mereka tidak mungkin tak diakui sebagai warga NU.

"Itu warga NU juga masa mau nggak kita akui kan kita nggak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu," ujarnya.

Terkait permasalahan itu, Gus Yahya menyebut bukan tidak ingin mengurus PKB. Sebab, lanjut dia, banyak juga warga NU yang tergabung di PKB.

"Bukan berarti kami nggak mau ngurus PKB loh ya, bukan berarti itu, karena kami tahu banyak warga NU ada di sana yang memang harus kami



Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf bersama Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf usai rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).ist

perhatikan juga, tapi sekali lagi ada banyak warga NU juga di tempat lain, yang juga harus kami layani semuanya," ucapnya.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelumnya mengaku ingin membentuk tim lima atau semacam panitia khusus (Pansus) tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut dia, tim ini merupakan upaya PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.

Gus Ipul prihatin melihat elit PKB banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal ketika PKB didirikan. Bahkan ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elit PKB guna menjauhkan PKB dari struktural NU.

Singgung Pansus Haji

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

"Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," tambahnya.

Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya,

menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Meski menduga ke arah sana, Yahya menyebut masih melihat perkembangan lebih lanjut dari pansus tersebut. Dia juga menyebut banyak juga jemaah NU yang ikut haji, dan mempersilakan mereka untuk bisa ditanyakan terkait pelaksanaannya.

"Kita kan punya jemaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada yang menurut saya," tuturnya.

Teroisag, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, mengaku heran dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang mengaitkan pembentukan Pansus Haji dengan masalah pribadi. Marwan menilai Gus Yahya terlalu heboh, padahal urusan permasalahan haji bukan ranah dari PBNU melainkan Kementerian Agama.

"Saya curiga kalau tokoh-tokoh ini, baik pimpinan ormas, baik para pengamat yang mencoba menggiring dalam hal politik dan kepentingan pribadi. Ngapain tuh tokoh-tokoh itu kok sibuk saja bicara-bicara begitu. Jadi curiga, mereka sebenarnya (yang) berkepentingan pribadi itu mereka. Kaitannya dengan mereka apa? Kok bicaranya begitu," kata Marwan kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menekankan Pansus Hak Angket Haji semata-mata untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah. Ia menyebut mayoritas jemaah menunggu pelaksanaan haji selama 48 tahun, sedangkan kebijakan yang dibuat Kemenag tak memprioritaskan hal tersebut.

"Sementara haji ini jemaahnya sudah menunggu 48 tahun. Ongkos hajinya mahal tidak ada upaya dari pemerintah. Nah sementara kita mendapatkan kuota tambahan 20 ribu

KOALISI PKB DARI ERA KE ERA

PEMILU 2004

Berkoalisi dengan PKS, Partai Demokrat, PAN, PBB, dan PKPI mengusung Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

PEMILU 2009

Berkoalisi dengan PKS, PAN, Demokrat mengusung pasangan SBY-Boediono.

PEMILU 2014

Berkoalisi dengan Partai NasDem, PDI Perjuangan, PKPI, Partai Hanura mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

PEMILU 2019

Berkoalisi dengan Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, PDI Perjuangan, Partai Hanura, PKPI mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

PEMILU 2024

Berkoalisi dengan PKS dan Partai NasDem mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.



gunanya mengurai antrean panjang, eh begitu dapat kok dikasih ke khusus," ungkapnya.

Ia mengatakan jumlah kuota tambahan bagi jemaah haji reguler sebenarnya sudah ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah. Kendati demikian, Kemenag justru mengubah sistem kuota yang membuat jemaah reguler menunggu semakin lama.

"Terbentuknya Pansus Angket Haji ini karena adiknya, Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas) itu tidak benar melaksanakan. Kok dicurigai," tutur anggota Timwas Haji DPR RI ini.

Marwan menyebut upaya yang dilakukan Gus Yahya bagian menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Ia heran mengapa Ketum PBNU menyampaikan hal itu, padahal bukan ranahnya.

"Ngapain ditutup-tutupi, kalau nggak salah ngapain takut. Nanti kita lihat, kan DPR punya hak bertanya, ya buktikan saja nanti. Dia melanggar atau tidak, kalau tidak melanggar ya ayok kita cari perbaikan dengan cara apa," ujar Marwa. (tro,wid,rls,inldya)